**BAB III**

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

1. **DASAR HUKUM**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaran pemerintahan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan, sebagaimana berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42286);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).
7. **GAMBARAN UMUM TUGAS PEMBANTUAN**

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari dua Kementeriansebagai berikut :

1. **Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian meliputi dua bidang urusan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pertanian

Tugas pembantuan bidang urusan pertanian diterima dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan dasar hukum pelaksanaan :

* + - 1. DIPA Nomor : 018.08.4.199133/2020 tanggal 7 januari 2020
      2. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 188-43/80/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020.

Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian, dimana alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 667.480.003,- (Enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga rupiah). Jumlah kegiatan sebanyak 4, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
3. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
4. Fasilitas Pembiayaan Pertanian
5. Bidang Urusan Pangan

Tugas pembantuan bidang urusan pangan diterima dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan dasar hukum pelaksanaan :

1. DIPA Nomor : 018.08.4.199133/2020 tanggal 7 Januari 2020
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
3. Peraturan Menteri Pertanian No.56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020
4. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan nomor 218/HK.310/C/12/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020
5. Rencana Operasional Penggunaan Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Selayar Satker Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018.03.4.199125 Tahun Anggaran 2020
6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 188.4.43/30/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten, Penanggungjawab Kegiatan, Bendahara Pembantu, Staf Bendahara Pembantu, Petugas Pelaporan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegaitan Tugas Pembantuan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020.

Tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dimana alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 337.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Jumlah kegiatan sebanyak 4, sebagai berikut:

* + - 1. Peningkatan produksi kacang hijau 100 Ha
      2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
      3. Dukungan manajemen dan tekhnis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan selama 12 bulan berupa :
      4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

1. **Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**

Tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan meliputi satu bidang urusan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Perdagangan

Tugas pembantuan bidang urusan perdagangan diterima dari Kementerian Perdagangan, dengandasar hukum pelaksanaan DIPA Nomor :SP DIPA-090.02.4.191438/2020 tanggal 17 Agustus 2020.

Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri, dimanaalokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).Adapunkegiatan sebagai berikut:

* Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selain mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian, juga mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dari :

1. **Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan**

Tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri satu bidang urusan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pangan

Tugas pembantuan bidang urusan pangan diterima dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, dengandasar hukum pelaksanaan DIPA Nomor : SP DIPA-081.11.3.199374/2020, tanggal 19 Juni 2020.

Tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dimanaalokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 508.420.000,- (Lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah kegiatan sebanyak 3, sebagai berikut:

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan

Pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Dukungan manajemen dan tekhnis lainnya Badan Ketahanan Pangan.

1. **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAN TUGAS PEMBANTUAN**

**3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH**

**3.1.1. Target Kinerja**

**A. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar**

**Bidang Urusan Pertanian**

Target Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 667.480.003,-(Enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga rupiah) dengan target kinerja kegiatan sebagai berikut :

* + - 1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
* Pembangunan embung pertanian 2 unit
  + - 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
* Pengelolaan Kegiatan selama 12 bulan
  + - 1. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
         1. e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi bebrbasis penerapan kartu tani penyusunan dan penginputan e-RDKK
* Up dating RDKK 11 kecamatan
* Koordinasi pengawalan dan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan
  + - * 1. Bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pupuk dan pestisida
* Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida berupa pembinaan peredaran pupuk dan pestisida serta penyusunan laporan KP3.
  + - 1. Fasilitas Pembiayaan Pertanian
         1. Bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian
* Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian berupa koordinasi pelaksanaan FPPS, temu usaha pembiayaan dan monev selama 7 bulan.

**BidangUrusan Pangan**

Target Kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dimana Alokasi anggaran sebesar Rp. 337.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan target capaian kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi kacang hijau 100 Ha
   * + - 1. Bantuan Benih 100 Ha
         2. Bantuan Pupuk Hayati Cair 100 Ha
2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
3. Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan
4. Dukungan manajemen dan tekhnis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan selama 12 bulan berupa
5. Layanan keuangan dan perlengkapan melalui pengelolaan perbendaharaan selama 12 bulan
6. Layanan evaluasi dan pelaporan melalui pengelolaan data dan informasi sebanyak 3 kali
7. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
8. Melaksanakan penyaluran perontok/pemipil untuk sarana pasca panen yaitu power thresher sebanyak 5 unit
9. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan sarana pasca panen tanaman pangan .

**B. OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

**1. Bidang Urusan Perdagangan**

Target Kinerja Program Pengembangan Perdagangan Dalam NegeriAlokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Target Kinerja Program dan Kegiatan :

* + - * 1. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan
* Pembangunan Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur

**3.1.2. Realisasi**

**A. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar**

**Bidang Urusan Pertanian**

Capaian realisasi anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertaniansebesar Rp. Rp.606.089.800,-(Enam ratus enam juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau terealisasi sekitar 90,81 %, dengan capaian realisasi target kinerja program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

* Pembangunan embung pertanian 2 unit

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana

* Pengelolaan Kegiatan selama 12 bulan

1. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
2. e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi bebrbasis penerapan kartu tani penyusunan dan penginputan e-RDKK

* Up dating RDKK 11 kecamatan
* Koordinasi pengawalan dan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan

1. Bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pupuk dan pestisida

* Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida berupa pembinaan peredaran pupuk dan pestisida serta penyusunan laporan KP3.

1. Fasilitas Pembiayaan Pertanian
2. Bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian

* Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian berupa koordinasi pelaksanaan FPPS, temu usaha pembiayaan dan monev selama 7 bulan.

**Bidang Urusan Pangan**

Capaian realisasi anggaranProgram Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 337.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau terealisasi 100 % dengan capaian target kinerja program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi kacang hijau 100 Ha
2. Bantuan Benih 100 Ha
3. Bantuan Pupuk Hayati Cair 100 Ha
4. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
5. Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan
6. Dukunganmanajemen dan tekhnis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan selama 12 bulan berupa
7. Layanan keuangan dan perlengkapan melalui pengelolaan perbendaharaan selama 12 bulan
8. Layanan evaluasi dan pelaporan melalui pengelolaan data dan informasi sebanyak 3 kali
9. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
10. Melaksanakan penyaluran perontok/pemipil untuk sarana pasca panen yaitu power thresher sebanyak 5 unit
11. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan sarana pasca panen tanaman pangan .

**B. OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

**1. Bidang Urusan Perdagangan**

Capaian realisasi anggaranProgram Pengembangan Perdagangan Dalam Negersebesar Rp. 2.452.883.108,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratur Delapan Rupiah) atau terealisasi 98,12 % dengan capaian target kinerja program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

* Pembangunan Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Selayar

| **NO.** | **BIDANG URUSAN** | **DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)** | **PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN** | **LOKASI** | **SKPD PELAKSANA TP** | **ALOKASI ANGGARAN** | **REALISASI ANGGARAN** | **(%)** | **REALISASI CAPAIAN KEGIATAN** | **(%)** | **KET.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **1.** | **Pertanian** | **Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020** | **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian** | **Kabupaten Kepulauan Selayar** | **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** | **667.480.003** | **606.089.800** | **100** |  | **100** |  |
|  |  |  | **Pembangunan Embung Pertanian mendukung TP** | **Desa Lembang Baji, Bontomalling Kec. Pastim** |  | **240.000.000** | **240.000.000** |  | **Tersedianya embung 2 unit** |  |  |
|  |  |  | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian |  |  | 147.840.003 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Lanyanan Dukungan Manajemen Satker(Base Line)** |  |  | **147.840.003** | **133.331.800** |  | **Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PSP** |  |  |
|  |  |  | Pengelolaan Kegiatan |  |  | 147.840.003 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Honor Operasional Satuan Kerja |  |  | 37.800.000 | 37.800.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 7.240.003 | 7.200.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Honor Output Kegiatan |  |  | 2.800.000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Beban Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 58.000.000 | 47.790.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |  |  | 27.000.000 | 26.100.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota |  |  | 15.000.000 | 14.441.800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitas Pupuk dan Pestisida |  |  | 279.640.000 | 232.758.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani (Base Line) |  |  | 148.050.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Penyusunan dan Penginputan e-RDKK mendukung Kartu Tani** |  |  | **148.050.000** | **120.050.000** |  | **Tersedianya laporan pupuk dan pestisida 1 dokumen** |  |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Honor Output Kegiatan |  |  | 100.950.000 | 100.950.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Jasa Profesi |  |  | 2.400.000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 17.100.000 | 17.100.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida (Base Line) |  |  | 84.500.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Pelaksanaan KP3 Mendukung Pengawasan Pupuk dan Pestisida** |  |  | **84.500.000** | **79.268.800** |  | **Tersedianya laporan KP3 1 dokumen** |  |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 6.000.000 | 5.998.800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Jasa Lainnya |  |  | 450.000 | 450.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 59.000.000 | 57.820.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam daerah |  |  | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitas Pembiayaan Pertanian |  |  | 47.090.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian (Base Line) |  |  | 47.090.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian |  |  | 47.090.000 | 33.440.000 |  | Tersedianya laporan pembiayaan pertanian 1 laporan |  |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 13.800.000 | 11.800.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Honor Output Kegiatan |  |  | 10.290.000 | 6.790.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Jasa profesi |  |  | 3.500.000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Beban Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 19.500.000 | 14.850.000 |  |  |  |  |
| **2.** | **Pangan** | **Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020** | **Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman** | **Kabupaten Kepulauan Selayar** | **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** | **337.000.000** | **337.000.000** | **100** | **Peningkatan Produksi Kacang Hijau Seluas 100 Ha dari target luasan pertanaman kacang hijau 100 Ha** | **100** |  |
|  |  |  | **Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Kawasan Kacang Hijau** |  |  | **87.000.000** | **87.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Penyaluran Sarana Produksi** |  |  | **87.000.000** | **87.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Hijau** |  |  | **87.000.000** | **87.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda |  |  | 87.000.000 | 87.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | - Bantuan Benih |  |  | 67.500.000 | 67.500.000 |  | Tersedianya Benih Kacang Hijau untuk luasan 100 Ha dari target luasan pertanaman kacang hijau 100 Ha | 100 |  |
|  |  |  | - Bantuan Pupuk Hayati Cair |  |  | 19.500.000 | 19.500.000 |  | Tersedianya pupuk hayati cair untuk luasan 100 Ha dari target luasan pertanaman kacang hijau 100 Ha | 100 |  |
|  |  |  | **Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan** |  |  | **14.400.000** | **14.400.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Koordinasi Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)** |  |  | **14.400.000** | **14.400.000** |  | Terlaksananya bimbingan dan sosialisasi kegiatan Pegelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan | 100 |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 12.400.000 | 12.400.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | **Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan** |  |  | **104.200.000** | **104.200.000** |  | Terlaksananya operasional kegiatan Tugas Pembantuan Tanaman Pangan | 100 |  |
|  |  |  | **Layanan Dukungan Manajemen Eselon I** |  |  | **104.200.000** | **104.200.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Layanan Keuangan dan Perlengkapan** |  |  | **101.500.000** | **101.500.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | Honorarium operasional Satuan Kerja |  |  | 51.000.000 | 51.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi |  |  | 24.000.000 | 24.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Jasa Profesi |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah |  |  | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | **Layanan Evaluasi dan Monitoring** |  |  | **2.700.000** | **2.700.000** |  | Tersedianya data dan informasi / laporan statistik tanaman pangan | 100 |  |
|  |  |  | **Pengelolaan Data dan Informasi** |  |  | **2.700.000** | **2.700.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar daerah |  |  | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | **Pengelolaan dan pemasaran Hasil Tanaman Pangan** |  |  | **131.400.000** | **131.400.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan** |  |  | **121.000.000** | **121.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Perontok/ Pemipil** |  |  | **121.000.000** | **121.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Peralatan dan mesin untuk Diserhkan Kepada Masyarakat/ Pemda |  |  | 121.000.000 | 121.000.000 |  | Tersedianya power thresher 5 unit dari target 5 unit power thresher | 100 |  |
|  |  |  | **Koordinasi Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)** |  |  | **10.400.000** | **10.400.000** |  | Terlaksananya sosialisasi dan bimtek sarana pascapanen TP | 100 |  |
|  |  |  | **Pengamanan Susut Hasil Produksi Tanaman Pangan** |  |  | **10.400.000** | **10.400.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 3.400.000 | 3.400.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalalan Dinas Biasa |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |  |  |
| **3.** | **Perdagangan** | **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan** | **Program : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri** | **Kec. Pasimasunggu Timur** | **Disperindagkukm Kab. Kep. Selayar** | **Rp 2.500.000.000,00** | **Rp 2.452.883.108,00** | **98,115** | **1 Unit** | **100** |  |
|  |  | Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan | **Kegiatan :** Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 ttg Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 | **Output :** Sarana Perdagangan yang dibangun/direvitalisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. TUGAS PEMBANTUAN DARI PROVINSI YANG DILAKSANAKAN**

**3.2.1. Target Kinerja**

**A. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar**

**Bidang Urusan Pertanian**

Target Kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 508.420.000,- (Lima ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Target Kinerja Program dan Kegiatan :

* + - 1. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
         1. Melakukan analisis ketersediaan pangan wilayah dengan cara mengumpulkan, mengelolah dan menganalisis data sehingga tersusun buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas -FSVA) level Desa/ Kelurahan 2020 se Kabupaten Kepulauan Selayar.
      2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan melalui pendampingan pemberdayaan pekarangan pangan untuk 8 (delapan) kelompok yaitu :

1. KWT Benteng Pancasila Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene
2. KWT Dahlia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu
3. KWT Teratai Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu
4. KWT Matahari Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu
5. KWT Mawar Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai
6. KWT Mekar Desa Kohala Kecamatan Buki
7. KWT Anggrek Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu
8. KWT Sayang Suami Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu
   * + 1. Dukungan manajemen dan tekhnis lainnya Badan Ketahanan Pangan yaitu dukungan manajemen dan administrasi 12 bulan.

**3.2.1. Realisasi**

**A. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar**

**1. Bidang Urusan Pertanian**

Capaian realisasianggaran sebesar 100% sebesar Rp.508.410.000,- (Lima ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) atau terealisasi 100 % dengan capaian target kinerja program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

* + - 1. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan

1. Melakukan analisis ketersediaan pangan wilayah dengan cara mengumpulkan, mengelolah dan menganalisis data sehingga tersusun buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas -FSVA) level Desa/ Kelurahan 2020 se Kabupaten Kepulauan Selayar.
   * + 1. Pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan melalui pendampingan pemberdayaan pekarangan pangan untuk 8 (delapan) kelompok yaitu :
2. KWT Benteng Pancasila Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene
3. KWT Dahlia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu
4. KWT Teratai Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu
5. KWT Matahari Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu
6. KWT Mawar Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai
7. KWT Mekar Desa Kohala Kecamatan Buki
8. KWT Anggrek Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu
9. KWT Sayang Suami Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu
   * + 1. Dukungan manajemen dan tekhnis lainnya Badan Ketahanan Pangan yaitu dukungan manajemen dan administrasi 12 bulan.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Selayar

| **NO.** | **BIDANG URUSAN** | **DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)** | **PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN** | **LOKASI** | **SKPD PELAKSANA TP** | **ALOKASI ANGGARAN** | **REALISASI ANGGARAN** | **(%)** | **REALISASI CAPAIAN KEGIATAN** | **(%)** | **KET.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Ketahanan Pangan | Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 637/III/tahun 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Kabupaten Kepulauan Selayar | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | **508.420.000** | **508.410.000** | **100** | Terealisasi | **100** |  |
|  |  | Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800.08/178/III/DKPn Tahun 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Anggaran dan Penetapan Besarnya Honor Terkait Dengan Operasional Kegiatan APBN (Dan Dekonsentrasi) Kabupaten/ Kota, Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020. | **Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan** |  |  | **42.000.000** | **42.000.000** | 100 |  |  |  |
|  |  |  | **Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah** |  |  | **42.000.000** | **42.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Mengumpulkan, Mengelola dan Menganalisis Data** |  |  | **42.000.000** | **42.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan FSVA Kabupaten Kepulauan Selayar |  |  | 42.000.000 | 42.000.000 |  | Tersusunnya buku FSVA Kab. Kepulauan Selayar | 100 |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Honor Output Kegiatan |  |  | 21.000.000 | 21.000.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi |  |  | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Beban Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |  |  | 7.500.000 | 7.500.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | **Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan** |  |  | **445.900.000** | **445.900.000** | 100 |  |  |  |
|  |  |  | **Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga** |  |  | **445.900.000** | **445.900.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Pendampingan Kab. Kepulauan Selayar (8 Kelompok)** |  |  | **445.900.000** | **445.900.000** |  | Kegiatan P2L sebanyak 8 Kelompok dari target 8 kelompok kegiatan P2L | 100 |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 13.500.000 | 13.500.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Honor Output Kegiatan |  |  | 24.000.000 | 24.000.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi |  |  | 1.767.000 | 1.767.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 2.233.000 | 2.223.000 | 99,55 |  |  |  |
|  |  |  | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota |  |  | 14.400.000 | 14.400.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah |  |  | 390.000.000 | 390.000.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | **Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan** |  |  | **20.520.000** | **20.520.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Layanan Dukungan Manajemen Eselon I** |  |  | **20.520.000** | **20.520.000** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Manajemen dan Administrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah** |  |  | **20.520.000** | **20.520.000** | 100 |  |  |  |
|  |  |  | **Dukungan Manajemen dan Administrasi** |  |  | **20.520.000** | **20.520.000** |  | Terlaksananya operasional kegiatan Ketahanan Pangan | 100 |  |
|  |  |  | Honorarium operasional Satuan Kerja |  |  | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Bahan |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Honor Output Kegiatan |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi |  |  | 1.820.000 | 1.820.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |  |  | 2.200.000 | 2.200.000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota |  |  | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 |  |  |  |

**3.3 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGASPEMBANTUAN**

1. **OPD Dinas Pertanian dan Ketanahan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Terbitnya aturan terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya melalui rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di Kab/Kota. Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk menyesuaikan dengan pagu baru, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak Target/Sasaran yang belum bisa dicapai.

1. **OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Selama proses pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tidak ditemukan kendala yang berarti

**3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT**

1. **OPD Dinas Pertanian dan Ketanahan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi dengan Eselon I (Kementerian/Lembaga ) juga dengan KPPN untuk memperoleh informasi terkait perubahan alokasi DIPA. Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan ulang kegiatan dan identifikasi capaian output kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan pagu baru.

Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

1. **OPD DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Untuk kedepan perlu Pengembangan sarana pasar yang representative.